

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Asshiddiqie, Jimly. *Pengadilan Khusus dalam Tim Penyusun Komisi Yudisial, Putih Hitam Pengadilan Khusus*. Jakarta: Pusat Analisis dan Layanan Informasi Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, 2013.
- _____. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Konstitusi Pers, 2006.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi*. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2016.
- Djafar, Wahyu, dkk. *Perlindungan Data Pribadi: Usulan Pelembagaan Kebijakan dari Perspektif Hak Asasi Manusia*. Jakarta: ELSAM, 2016.
- Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russel Sage Foundation, 1975.
- Hall, Daniel E. *Constitutional Law Case and Commentary*. USA: Delmar Publishers. 1997.
- Huda, UU Nurul. *Hukum Lembaga Negara*. Bandung: PT Refika Aditama, 2020.
- I, A. Rahman H.. *Sistem Politik Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2017.
- Ibrahim, Johny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya: Bayumedia, 2008.
- Indrayana, Denny. *Negara Antara Ada dan Tiada Reformasi Hukum Ketatanegaraan*. Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2008.

- Karo, Risky P. P. dan Teguh Prasetyo. *Pengaturan Data Pribadi di Indonesia: Perspektif Teori Keadilan Bermatabat*. Bandung: Nusa Media, 2020.
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Pembinaan Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional*. Bandung: Binacipta, 1986.
- Kusumohamidjoo, Budiono. *Filsafat Hukum, Problematik Ketertiban yang Adil*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2004.
- Lukito, Ratno. *Perbandingan Hukum: Perdebatan Teori dan Metode*. Yogyakarta: UGM Press, 2016.
- MD, Mahfud. *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Yogyakarta: Gama Media, 1999.
- Rahayu. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2015.
- Rosadi, SD. *Cyber Law Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional, dan Nasional*. Jakarta: Refika Aditama, 2015.
- Sabon, Max Boli. *Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Universitas Atma Jaya Press, 2015.
- Schoeman, Ferdinand David. *Privacy and Social Freedom*. UK: Cambridge University Press, 1992.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press, 2009.
- Soemitro, Ronny Haniatjo. *Metode Penelitian dan Jurumetri*. Jakarta: PT Ghalia Indonesia, 1990.
- Wang, Hao. *Protecting Privacy in China*. Heidelberg: Springer Berlin, 2011.

B. Jurnal/Artikel

- Basarah, Ahmad. "Kajian Teoritis Terhadap Auxiliary State's Organ Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia", *Jurnal MMH Vol. 43 No. 1* (2014).
- Doly, Denico. "Pembentukan Lembaga Pengawas Perlindungan Data Pribadi dalam Perspektif Pembentukan Lembaga Negara Baru." *Negara Hukum: Vil 12, No. 2* (November 2021).
- Eoin, Carolan. "The Concept of a Right to Privacy." *University College Dublin Press*. (July 19, 2011). SSRN: <https://ssrn.com/abstract=1889243>
- Gunawan A. Tauda, "Kedudukan Komisi Negara Independen Dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia." *Pranata Hukum Vol. 6 No. 2* (Juli 2011).
- Hantoro, Novianto M.. "Klasifikasi Jabatan dalam Kelembagaan Negara : Permasalahan Kategori Pejabat Negara." *Jurnal Negara Hukum Vol. 7 No. 2* (2016).
- Iswandi, Kelik dan Nanik Prasetyoningsih. "Kedudukan State Auxiliary Organ dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia." *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan Vol 1 No. 2* (September 2020).
- Khansa, Farah Naurah. "Penguatan Hukum dan Urgensi Otoritas Pengawas Independen Dalam Perlindungan Data Pribadi di Indonesia" *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol. 2, No. 8* (Agustus 2021).
- Lukito, Ratno. "Compare but Not to Compare: Kajian Perbandingan Hukum di Indonesia." *Undang: Jurnal Hukum Vol. 5 No. 2*. (2022). DOI: 10.22437/ujh.5.2.257-291.

Lynskey, Orla. “Deconstructing Data Protection: the ‘Added-Value’ of a Right to Data Protection in the EU Legal Order.” *International and Comparative Law Quarterly* 3, 63. (2014)

Paterson, Moira dan Maeve McDonagh. “Data Protection in an Era of Big Data: The Challenges Posed by Big Personal Data”. *Monash University Law Review Vol. 44 No.1.* (2019).

Pery, Eric Ardiansyah. “Tanggung Jawab Negara Terhadap Perlindungan Data Pribadi di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.” *JOM FH Universitas Riau Volume IX No. 2.* (Juli-Desember 2022).

Pramudito, Anjas Putra. “Kedudukan dan Perlindungan Hak Atas Privasi di Indonesia.” *Jurist-Diction, Vol. 3 No. 4.* (Juli 2020).

Yolanda, Erlyn dan Rugun Romaida Hutabarat. “Urgensi Lembaga Perlindungan Data Pribadi di Indonesia Berdasarkan Asas Hukum Responsif.” *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Vol. 8, No. 6* (Juni 2023).

Yuniarti, Siti. “Perlindungan Hukum Data Pribadi di Indonesia.” *Jurnal BECOSS Vol. 1 No. 1.* (September 2019).

C. Makalah

Asshiddiqie, Jimly. “Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD Tahun 1945.” Makalah disampaikan pada seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII Denpasar (Juli 2003).

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi.

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 Tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 Tentang Kementerian Dalam Negeri.

Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Kementerian Perdagangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan.

E. Dokumen Internasional/Aturan Internasional

APEC. *APEC Privacy Framework 2015*. Singapore: APEC Secretariat. 2017.

Data Protection Act 2018.

European Union Agency for Fundamental Rights and Council of Europe.

Handbook on European Data Protection Law. Luxemburg: Publications Office of The European Union. 2018.

European Commission. *Opinion 4/2007 on The Concept of Personal Data:*

Article 29 Data Protection Working Party. Brussels: Secretariat of the European Commission. 2007.

Federal Data Protection Act of 30 June 2017 (Federal Law Gazette I p. 2097),

as last amended by Article 10 of the Act of 23 June 2021 (Federal Law Gazette I, p. 1858; 2022 I p. 1045).

French Act Number 2018-493 of 20 June 2018.

OECD. “Report On The Implementation Of The Recommendation Of The Council Concerning Guidelines Governing The Protection Of Privacy And Transborder Flows Of Personal Data.” *Secretary General OECD*. C(2021)42.

_____. “The Evolving Privacy Landscape: 30 Years After the OECD Privacy Guidelines”, *OECD Digital Economic Papers No 176*. (2011).

Personal Information Protection Act Number 16930 (Amended by Act No. 16930, 4. February, 2020)

The Act on the Protection of Personal Information (Act No. 57 of 2003 As Amended).

F. Internet

Ade Miranti Karunia. “Kemenkominfo Tangani 94 Kasus Kebocoran Data, 28 diantaranya akibat serangan siber.” [kompas.com, https://money.kompas.com/read/2023/06/12/163500026/kemenkominfo-tangani-94-kasus-kebocoran-data-28-di-antaranya-akibat-serangan](https://money.kompas.com/read/2023/06/12/163500026/kemenkominfo-tangani-94-kasus-kebocoran-data-28-di-antaranya-akibat-serangan).

Diakses pada 23 Februari 2024.

Amin Iskandar. “Undang-Undang Pelindungan atau Perlindungan.” [Kompas.id, https://www.kompas.id/baca/opini/2022/11/17/pelindungan-dan-perlindungan](https://www.kompas.id/baca/opini/2022/11/17/pelindungan-dan-perlindungan), diakses pada 10 Maret 2024.

Arnidhya Nur Zhafira. “Kominfo akan Keluarkan Putusan Resmi Terkait Data Bocor BPJS Kesehatan”. [antaranews.com, https://www.antaranews.com/berita/2479869/kominfo-akan-keluarkan-putusan-resmi-terkait-data-bocor-bpjs-kesehatan](https://www.antaranews.com/berita/2479869/kominfo-akan-keluarkan-putusan-resmi-terkait-data-bocor-bpjs-kesehatan). Diakses pada 20 Mei 2024.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. “Kamus Besar Bahasa Indonesia.” <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/lembaga>. Diakses 25 Februari 2024.

. “Kamus Besar Bahasa Indonesia.” <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pelindungan>. Diakses 10 Maret 2024.

Balqis Fallahnda. “Kronologi LockBit Diduga Curi Data Nasabah BSI dan Update Terkini.” [tirto.id, https://tirto.id/kronologi-lockbit-diduga-curi-data-nasabah-bsi-update-terkini-gHpm](https://tirto.id/kronologi-lockbit-diduga-curi-data-nasabah-bsi-update-terkini-gHpm). Diakses pada 21 Mei 2024.

BBC News Indonesia. "BPJS Kesehatan: Data ratusan juga peserta diduga bocor 'otomatis yang dirugikan masyarakat', kata pakar." BBC Indonesia. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-57196905>. Diakses pada 20 Mei 2024.

Bryan Mitchell Lee. "Deeper Insight Towards Indonesia's Biggest Data Leak." <https://bmleebigby.medium.com/deeper-insight-towards-indonesias-biggest-data-leak-9e0c596383b0>. medium.com. Diakses pada 20 Mei 2024.

Cindy Mutia Annur. "10 Negara dengan Kasus Kebocoran Data Terbanyak, ada Indonesia?" [katadata.com. https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/12/30/10-negara-dengan-kasus-kebocoran-data-terbanyak-ada-indonesia](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/12/30/10-negara-dengan-kasus-kebocoran-data-terbanyak-ada-indonesia). Diakses 1 Mei 2024.

CNN Indonesia. "35 Kebocoran Data 2023. Kominfo Akui Cuma Beri Rekomendasi dan Teguran." [cnnindonesia.com. https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20230619141948-192-963776/35-kebocoran-data-2023-kominfo-akui-cuma-beri-rekomendasi-dan-teguran](https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20230619141948-192-963776/35-kebocoran-data-2023-kominfo-akui-cuma-beri-rekomendasi-dan-teguran). Diakses pada 21 Mei 2024.

_____. "Kronologi Lengkap 91 Juta Akun Tokopedia Bocor dan Dijual". [cnnindonesia.com. https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200503153210-185-499553/kronologi-lengkap-91-juta-akun-tokopedia-bocor-dan-dijual](https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200503153210-185-499553/kronologi-lengkap-91-juta-akun-tokopedia-bocor-dan-dijual). Diakses pada 20 Mei 2024.

_____. "Menkominfo Soal Investigasi Kasus Data SIM Card", [cnnindonesia.com](https://www.cnnindonesia.com).

<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20220910010331-192-845904/menkominfo-soal-investigasi-kasus-data-sim-card-jangan-tanya-saya>. Diakses pada 28 April 2024.

_____. “Siapa Tanggung Jawab Urus Bocor Data Seperti Kasus Bjorka?”. [cnnindonesia.com](https://www.cnnindonesia.com).

<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20220916032811-192-848550/siapa-tanggung-jawab-urus-bocor-data-seperti-kasus-bjorka>. Diakses pada 26 Februari 2024.

_____. “Situs Administrasi Pemerintah Jadi yang Terbanyak Dibobol Hacker”, [cnnindonesia.com](https://www.cnnindonesia.com),

<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20231024152212-192-1015287/situs-administrasi-pemerintah-jadi-yang-terbanyak-dibobol-hacker>. Diakses pada 21 Mei 2024.

Dian Dewi Purnamasari. “Kewenangan Otoritas Pengawas Data Pribadi Tetap Perlu Diperkuat.” [Kompas.com](https://www.kompas.com).
<https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/02/25/kewenangan-otoritas-pengawas-data-pribadi-tetap-perlu-diperkuat>. Diakses pada 22 Februari 2024.

Fea. “337 Juta Data Dukcapil Diduga Bocor dan Dijual di Forum Hacker.” [cnnindonesia.com](https://www.cnnindonesia.com).

<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20230716223757-192-974143/337-juta-data-dukcapil-diduga-bocor-dan-dijual-di-forum-hacker>. Diakses pada 20 Mei 2024.

Kementerian Komunikasi dan Informatika. “Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Perlindungan Data Pribadi.” <https://pdp.id/>, diakses pada 10 Maret 2024.

_____ . “Gerak Cepat Kominfo Melindungi Data Pribadi”. <https://www.kominfo.go.id/content/detail/34813/gerak-cepat-kominfo-melindungi-data-pribadi/0/artikel>. Diakses pada 20 Mei 2024

Kurnia Yunita Rahayu. “Masyarakat Permasalahkan Pemerintah Tak Cermat Kelola Data Pribadi.” [Kompas.com, https://www.kompas.id/baca/polhuk/2021/06/18/masyarakat-permasalahkan-pemerintah-tak-cermat-kelola-data-pribadi](https://www.kompas.id/baca/polhuk/2021/06/18/masyarakat-permasalahkan-pemerintah-tak-cermat-kelola-data-pribadi). Diakses pada 26 Februari 2024.

Nikolaus Harbowo. “Pelanggaran Data Pribadi Meningkat, Menkominfo Diminta Bertanggung Jawab.” [Kompas.com, https://www.kompas.id/baca/polhuk/2022/11/23/insiden-pelanggaran-data-pribadi-meningkat-menkominfo-diminta-bertanggung-jawab](https://www.kompas.id/baca/polhuk/2022/11/23/insiden-pelanggaran-data-pribadi-meningkat-menkominfo-diminta-bertanggung-jawab). Diakses pada 1 Mei 2024.

Oktarina Paramitha Sandy. “Data 91 Juta Akun Tokopedia Bocor, Hakim PN Jakpus Tolak Gugatan KKI.” [cyberthreat.id. https://cyberthreat.id/read/9069/Data-91-Juta-Akun-Tokopedia-Bocor-Hakim-PN-Jakpus-Tolak-Gugatan-KKI](https://cyberthreat.id/read/9069/Data-91-Juta-Akun-Tokopedia-Bocor-Hakim-PN-Jakpus-Tolak-Gugatan-KKI). Diakses pada 20 Mei 2024.

Teguh

Aprianto.

<https://x.com/secgiron/status/1256812647728549888?t=n2DCdNqVh1cqiSSKx844Hw&s=19>. x.com. Diakses pada 20 Mei 2024.

<https://x.com/secgiron/status/1658746102387216384?t=acStprkxiHwFtHzAH80DaQ&s=19>. x.com. Diakses pada 20 Mei 2024.

Waqas. “Tokopedia Hacked – Login details of 91 million users sold on dark web.” Hackread.com. <https://www.hackread.com/tokopedia-hacked-login-details-sold-on-dark-web/>. diakses pada 20 Mei 2024.